



Hari Laksono

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jl. Perintis Kemerdekaan No 175

Banyumanik - Semarang

hari.laksono@bpk.go.id



THE EVALUATION OF SIMDA BMD IN GROBOGAN DISTRICT USING COMBINATION OF DELONE MCLEAN AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

EVALUASI KESUKSESAN SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN MENGUNAKAN MODEL KOMBINASI DELONE MCLEAN DAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

ABSTRACT / ABSTRAK

Grobogan District Government adopts SIMDA BMD for its assets administration. Evaluation of SIMDA BMD in Grobogan District needs to be done to measure the success of the system. This study aims to evaluate the success of SIMDA BMD in Grobogan using variables i.e. system quality, information quality, service quality and user satisfaction from updated Delone McLean. Those variables are combined with the perceived usefulness and perceived ease of use from Technology Acceptance Model (TAM) to know the effects on the net benefits of SIMDA BMD. Respondents in this study are SIMDA BMD users, especially assets managers of government agencies in Grobogan District. Using PLS for data analysis, this study find that system quality, information quality and perceived ease of use affect the perceived usefulness, system quality and information quality affect the perceived ease of use, perceived usefulness, perceived ease of use and service quality affect user's satisfaction, and user satisfaction affects net benefits. However, the system quality and information quality variables do not affect the net benefits of SIMDA BMD in Grobogan District.

Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadopsi SIMDA BMD untuk penatausahaan aset daerah. Evaluasi terhadap kesuksesan penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan guna mengukur kesuksesan sistem. Evaluasi SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna dari Model Kesuksesan Sistem Informasi *Updated* DeLone McLean. Variabel tersebut digabungkan dengan variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan dari Model TAM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD. Responden penelitian adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh organisasi perangkat daerah. Analisis data menggunakan PLS menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan, kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih (*net benefits*). Sedangkan variabel kualitas sistem dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan.

KEYWORDS:

the system success evaluation; SIMDA BMD DeLone McLean; TAM; e-government

KATA KUNCI:

evaluasi kesuksesan sistem; SIMDA BMD; DeLone McLean; TAM; e-government

SEJARAH ARTIKEL:

Diterima pertama: 29 September 2017

Dinyatakan dapat dimuat: 19 Desember 2017

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengaturan urusan rumah tangga daerah, penetapan kebijakan, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri. Salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah. Untuk dapat menjalankan proses penatausahaan barang milik daerah dengan baik maka pemerintah telah mengatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tujuannya supaya pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola barang milik daerah sejak perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, penggunaan, hingga penghapusannya (Kementerian Dalam Negeri, 2016).

Pengelolaan barang milik daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintah daerah. Penyajian barang milik daerah di dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting artinya bagi pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah

daerah. Opini BPK RI terbagi menjadi empat kategori dari yang paling bagus yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Tidak Wajar (*Adverse*). Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan barang milik daerah (BPK, 2017a).

Pengambil keputusan pemerintah daerah banyak yang memilih menggunakan sistem informasi dalam proses pengelolaan barang milik daerah untuk membantu pengelolaan barang milik daerah serta dapat menghasilkan informasi yang relevan, cukup, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya (Budiriyanto, 2013). Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan barang dan aset pemerintah daerah. SIMDA BMD telah menjadi salah satu sistem informasi yang paling banyak digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah dengan jumlah pengguna sampai dengan Januari 2016 sebanyak 347 pemerintah daerah di seluruh Indonesia (Tim Aplikasi SIMDA, 2017).

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah menggunakan SIMDA BMD sejak tahun 2014. Penggunaan SIMDA BMD diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam pengelolaan barang dan aset daerah yang antara lain akan berdampak pada perbaikan dari opini hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk LKPD tahun 2011 s.d. 2016 dapat dilihat pada tabel 1. Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dikatakan telah mengalami perbaikan penatausahaan aset daerah, hal ini ditandai dengan perkembangan opini yang diperoleh,

yaitu opini WTP dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengetahui kesuksesan sistem informasi tersebut.

Tabel 1. Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016

TAHUN	OPINI BPK
2011	Wajar Dengan Pengecualian
2012	Wajar Dengan Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 (BPK RI, 2017b)

LANDASAN TEORI

Proses Pengelolaan BMD dalam SIMDA BMD

Sistem informasi dapat diartikan sebagai seperangkat komponen yang dapat saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2005). Selain itu definisi lain dari sistem informasi yaitu suatu rangkaian orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi dan sebuah sistem yang menerima sumber daya akan menggunakan sumber daya tersebut sebagai *input* dan memprosesnya untuk menjadi produk informasi sebagai *output* (O'Brien, 2004).

SIMDA BMD merupakan aplikasi komputer yang dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan membantu pengelolaan barang milik daerah, sehingga siklus barang milik daerah dapat berjalan dengan baik (BPKP, 2010). Program

Aplikasi Komputer SIMDA BMD ini pada dasarnya digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi Pengolahan BMD digunakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan (BPKP, 2017).

SIMDA BMD yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan saat ini adalah SIMDA BMD versi 2.0.7 yang merupakan versi terbaru yang dikembangkan oleh BPKP untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sistem operasi untuk menjalankan SIMDA BMD adalah Microsoft SQL Server 2008 untuk *server* dan Windows OS untuk *client*. Untuk pemrosesan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilaksanakan secara *batch* maupun *online*.

Pengelolaan Barang Milik Daerah menurut PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) pemanfaatan; (5) pengamanan dan pemeliharaan; (6) penilaian; (7) pemindahtanganan; (8) pemusnahan; (9) penghapusan; (10) penatausahaan; dan (11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sebelas proses pengelolaan BMD tersebut, tujuh proses diantaranya diakomodir dalam fungsi SIMDA BMD, yaitu (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) pengadaan; (3) penggunaan; (4) penatausahaan; (5) pemanfaatan; (6) pemeliharaan; dan (7) penghapusan. Terdapat satu fungsi tambahan untuk membantu proses rekonsiliasi antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah, yaitu menu "Akuntansi".

Rincian tentang proses pengelolaan BMD pada SIMDA BMD pada Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pada menu “Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran”, *user* dapat melakukan proses *input* data barang milik daerah yang dibutuhkan, yang akan dianggarkan dan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Termasuk data barang milik daerah yang memerlukan pemeliharaan. Setelah daftar tersebut disetujui maka akan menjadi bahan pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran berikutnya. Laporan yang dihasilkan yaitu Daftar Rencana Kebutuhan Barang, Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan, Daftar Kebutuhan Barang dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan.

Manfaat dari menu ini adalah:

- a. Pengelola barang dapat merencanakan secara lebih baik dan matang tentang pengadaan barang milik daerah;
- b. Adanya perencanaan yang baik maka efektivitas dan efisiensi pengadaan barang modal dapat ditingkatkan.

2. Pengadaan

- a. Pada menu “Pengadaan”, *user* dapat memasukkan data kontrak dan rincian aset yang ada pada kontrak, sehingga akan diperoleh informasi tentang kontrak-kontrak yang sudah dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Dengan ter-*input*nya rincian aset pada kontrak, maka dapat dibandingkan dengan data perencanaan kebutuhan, apakah BMD yang direncanakan dibeli sama dengan yang direncanakan dalam Daftar Kontrak Barang Milik Daerah (DKBMD).

Selain data kontrak, data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kontrak tersebut juga di-*input* sehingga akan terlihat kemajuan pembayaran kontrak.

Ketika pembayaran 100%, sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen pendukung lainnya, maka *user* dapat melakukan posting Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pada menu ini juga terdapat submenu khusus untuk inventarisasi yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang baru pertama kali menggunakan SIMDA BMD dan submenu “Belanja Penunjang” untuk melakukan *input* data-data belanja selain belanja modal yang turut memengaruhi terjadinya aset atau disebut proses kapitalisasi. Laporan yang dihasilkan yaitu Daftar Pengadaan Barang dan Daftar Hasil Pemeliharaan. Manfaat dari menu ini adalah

- a. Pengurus barang dapat mengetahui kemajuan penyelesaian kontrak dan melakukan posting ke KIB;
- b. Nilai BMD akan terkapitalisasi dengan Belanja Penunjang;
- c. Pemutakhiran data KIB dapat dilakukan secara berkala.

3. Penggunaan

Pada menu “Penggunaan”, *user* dapat memasukkan Surat Keputusan (SK) Penggunaan Aset Tetap yang ditetapkan oleh kepala daerah. Seperti diketahui, terdapat pengadaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan setelah terealisasi, maka barang/aset tersebut didistribusikan kepada unit lain. Pendistribusian tersebut ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, sehingga menu ini bertujuan untuk menyajikan data, siapa atau SKPD mana yang telah ditetapkan sebagai pengguna barang. Laporan dari menu ini adalah Lampiran SK Penggunaan Barang.

4. Penatausahaan

Proses *input* data rinci dari masing-masing BMD seperti tanah, peralatan dan mesin,

bangunan, jalan dan jaringan serta aset lainnya, ada pada menu “Penatausahaan”. Masing-masing barang memperoleh kode register barang yang berbeda. Kode register merupakan identitas khusus untuk setiap barang. Dengan adanya kode register ini maka diharapkan pada saat perencanaan, pengadaan, penghapusan, pindah SKPD dan kapitalisasi dapat menunjuk langsung kode register barang yang dimaksud. Dengan demikian tidak ada lagi satu barang dengan beberapa kode register. Laporan yang dihasilkan dari menu ini adalah KIB A-F, Rekap KIB A-F, Kartu Inventaris Ruang, Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Label Kode Barang, dan Kartu Barang A-F.

Manfaat dari menu ini adalah supaya *user* dapat:

- a. mengetahui data rinci dari masing-masing barang;
- b. mengubah data rinci dari masing-masing barang dengan melakukan *edit* atas data dan penambahan nilai dengan kapitalisasi;
- c. melakukan proses pindah OPD atas barang yang telah diterbitkan SK Penggunaan;
- d. mengetahui histori dari setiap BMD (sesuai kode register) sejak mulai pengadaan, data kapitalisasi, data pemeliharaan dan data pindah OPD.

5. Pemanfaatan

BMD yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD masuk dalam kategori pemanfaatan dan tidak mengubah status kepemilikan BMD. Dengan tidak adanya perubahan status kepemilikan maka BMD tidak dapat dihapuskan dari Buku Inventaris. Laporan dari menu pemanfaatan adalah Laporan Pemanfaatan untuk setiap jenis BMD yaitu tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan jaringan dan irigasi, serta aset tetap

lainnya.

Manfaat dari menu ini adalah memantau BMD yang telah masuk kategori pemanfaatan dengan mengetahui dimana aset tersebut, kapan perjanjian berakhir, serta dengan pihak mana pemerintah daerah bekerja sama sehingga dapat meminimalkan potensi kehilangan aset.

6. Pemeliharaan

Peng-*input*-an data pemeliharaan ringan dan sedang yang tidak masuk dalam kategori kapitalisasi aset berada pada menu ini. Laporan yang dihasilkan adalah Daftar Pemeliharaan Aset Tetap. Manfaat dari menu ini adalah:

- a. data histori atas pemeliharaan untuk masing-masing BMD;
- b. terdapat kontrol terhadap belanja pemeliharaan, dengan tidak menganggarkan secara berulang pemeliharaan pada BMD yang sama;
- c. mengetahui daftar kontrak pemeliharaan.

7. Penghapusan

Menu ini adalah untuk mencatat BMD yang telah dihapuskan dengan SK Penghapusan. Laporan dari menu ini adalah Lampiran SK Penghapusan. Manfaat dari menu ini meliputi pembaruan data Buku Inventaris atas BMD yang telah dihapuskan dan data BMD apa saja yang telah dihapuskan sebagai bahan pertanggungjawaban.

8. Akuntansi

Pengelolaan BMD berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan, oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara data keuangan dengan data BMD. Untuk mempermudah rekonsiliasi tersebut maka pada SIMDA BMD telah dilakukan *mapping* secara otomatis atas kategori BMD ke kategori aset tetap di neraca. Dengan dilakukan rekonsiliasi

maka diharapkan data aset tetap antara pengelola barang dan pengelola keuangan sama. Laporan dari menu ini adalah Buku Inventaris Intra Komptabel, Buku Inventaris Ekstra Komptabel, Daftar Penyusutan Aset Tetap. Manfaat dari menu ini adalah user dapat dengan mudah melakukan rekonsiliasi aset antara pengelola keuangan dengan pengelola barang.

Pengendalian internal atas pengaksesan pada SIMDA BMD dilakukan pada menu “Otoritas User Menu” yang digunakan untuk melakukan pembatasan user untuk menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Transaksi pada menu ini hanya dapat dilakukan oleh administrator aplikasi SIMDA BMD.

Technology Acceptance Model (TAM)

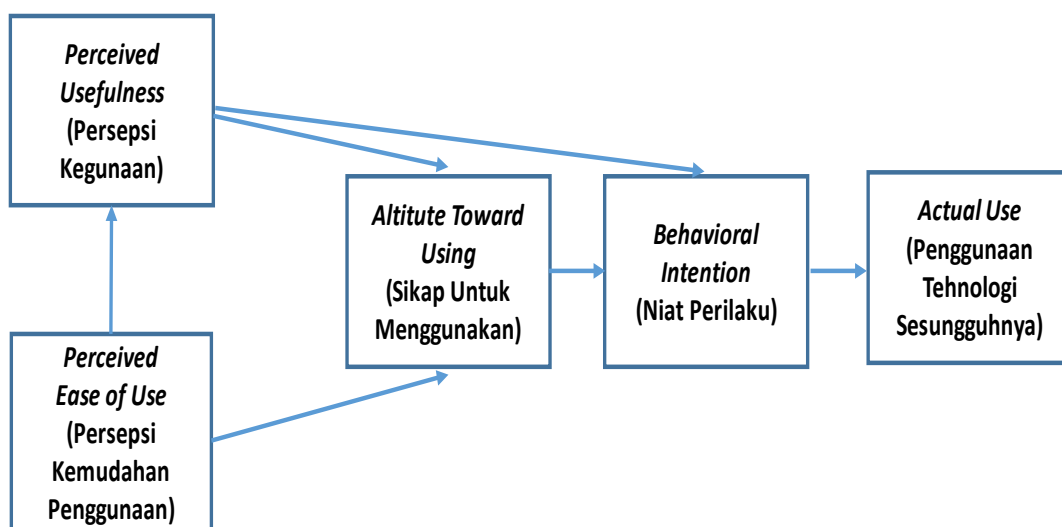
TAM dikembangkan oleh Fred D. Davis berdasarkan model *Theory of Reasoned Action* (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan. Model TAM yang dikembangkan dari teori psikologi menjelaskan perilaku pengguna sistem informasi, yaitu berdasarkan kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), niat (*intention*), dan hubungan perilaku pengguna (*user behaviour relationship*) (Davis, 1989).

Model Kesuksesan DeLone dan McLean

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (1992) telah diperbarui menjadi Model *update* Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003). DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa kesuksesan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem (*system quality*) dan kualitas pelayanan (*service quality*) yang merupakan faktor signifikan atas kepuasan pengguna (*user satisfaction*) dan keinginan menggunakan (*intention to use*).

Kepuasan pengguna menjadi faktor yang signifikan terhadap keinginan menggunakan dan berpengaruh terhadap *net benefits* (DeLone & McLean, 2003). Model penelitian DeLone dan McLean *Information System Success Model* disajikan pada gambar 2.

Penelitian dengan menggunakan Model *Update* Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003) untuk evaluasi atas suatu sistem telah dilakukan oleh Andriyani (2011). Model penelitian tersebut menggunakan Model Penelitian Wixom dan Watson (2001) yang diterapkan pada Model *Update* Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean.



Gambar 1. Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989)

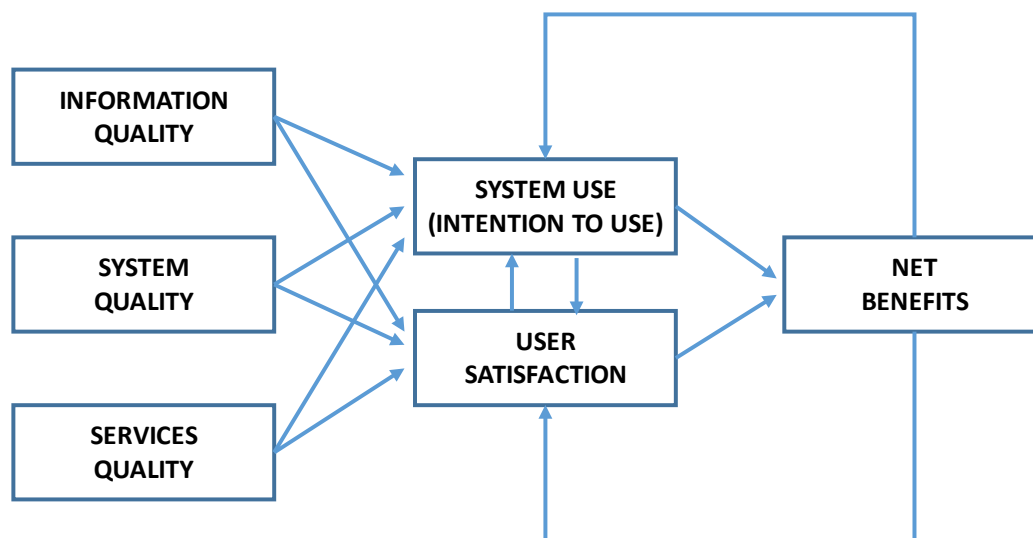
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *perceived system quality* dan *user satisfaction* berpengaruh secara positif terhadap *organizational impact*, namun *perceived information quality* tidak berpengaruh secara positif terhadap *organizational impact* (Andriyani, 2011).

Penelitian lainnya telah dilakukan oleh Istiyana (2014) dengan menggunakan Model DeLone dan McLean (1992) modifikasian dari penelitian Seddon (1997). Penelitian Istiyana menambahkan variabel kegunaan persepsi (*perceived usefulness*) dan variabel kemudahan penggunaan persepsi (*perceived ease of use*) dari Model TAM (Davis, 1989). Hasil dari penelitian tersebut mendukung penelitian Seddon (1997), yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada kegunaan persepsi dan kemudahan penggunaan persepsi terhadap kepuasan pengguna (Istiyana, 2014).

Laksono (2014) melakukan penelitian untuk menguji penggunaan aplikasi SIMDA BMD di Kabupaten Klaten dengan menggunakan modifikasi dari Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean dengan TAM. Sampel diambil dari 35 orang pengguna

SIMDA BMD yang merupakan pengurus barang di Pemerintah Kabupaten Klaten. Hasilnya menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Kualitas sistem dan kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih, dan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap manfaat bersih.

Selain itu, Nussy dan Tanaamah (2015) melakukan penelitian untuk menguji penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sampel diambil dari 33 orang pegawai pengguna SIMDA Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut dari empat hipotesis yang diajukan seluruhnya signifikan, yaitu persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan dan sikap penggunaan, persepsi kegunaan berpengaruh terhadap sikap penggunaan, dan niat penggunaan berpengaruh terhadap sikap penggunaan.



Gambar 2. The Reformulated DeLone & McLean IS Success Model (DeLone & McLean, 2003)

Pengembangan Hipotesis

Variabel-variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kualitas Sistem

Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Fokus kualitas sistem ada pada performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur sistem informasi dalam menyediakan kebutuhan informasi bagi pengguna (DeLone & McLean, 1992). Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem diadaptasi dari penelitian Livari, yaitu kehandalan, akurasi data, waktu respon dan *turnover* cepat, mudah digunakan, dan konektivitas antar bagian (Livari, 2005).

2. Kualitas Informasi

Kualitas informasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu *output* sistem informasi, menyangkut nilai, manfaat, relevansi dan urgensi atas informasi yang dihasilkan (Jogiyanto, 2007). Indikator yang digunakan untuk mengukur Kualitas Informasi diadaptasi dari penelitian Livari yaitu keakuratan, tepat waktu, kegunaan informasi, mudah dipahami, kelengkapan (Livari, 2005).

3. Kualitas Pelayanan

Definisi kualitas pelayanan lebih difokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pemakai serta ketepatan penyampaian untuk memenuhi harapan pemakai (Jogiyanto, 2007). Apabila pelayanan yang diterima melampaui harapan konsumen maka kualitas pelayanan dapat dikatakan sebagai kondisi yang ideal. Namun sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diterima oleh pemakai lebih rendah dari harapan maka kualitas pelayanan dapat dianggap

buruk. Baik buruknya kualitas pelayanan bukan dilihat dari sisi penyedia layanan, namun berdasarkan sisi pengguna sistem informasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan diadaptasi dari penelitian DeLone dan McLean yaitu pelayanan yang cepat (*responsiveness*), pengetahuan yang baik (*reliability*), sikap peduli (*emphaty*), memberi solusi atas permasalahan (*assurance*), dan dibekali perlengkapan yang memadai (*tangible*) (DeLone & McLean, 2003).

4. Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang percaya bahwa sistem informasi berguna, maka pengguna akan terus menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna, maka pengguna tidak akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007). Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kegunaan diadaptasi dari penelitian Davis, yaitu bekerja dengan lebih cepat, performa pekerjaan, meningkatkan produktivitas, efektif, membuat pekerjaan lebih mudah dan bermanfaat (Davis, 1989).

5. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan teknologi informasi akan bebas dari usaha. Dari definisi tersebut diketahui bahwa konstruk kemudahan penggunaan persepsi merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan (Jogiyanto, 2007). Indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan diadaptasi dari penelitian Davis yaitu mudah untuk dipelajari, dapat dikontrol, mudah dipahami, fleksibel dalam penggunaan dan mudah digunakan (Davis, 1989).

6. Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai pengguna yang percaya bahwa sistem informasi yang tersedia sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan (Ives, dkk., 1983). Kepuasan pengguna merupakan umpan balik yang dilakukan oleh pengguna setelah menggunakan sistem informasi (Jogiyanto, 2007). Sikap pengguna atas sistem informasi dapat dijadikan sebagai kriteria yang subjektif atas sejauh mana rasa suka pengguna pada sistem yang digunakan. Suatu sistem informasi dikatakan mengalami kegagalan disebabkan ketidakmampuan suatu sistem informasi dalam memenuhi ekspektasi pemakai. Sehingga dalam perencanaan sistem informasi harus mampu melakukan prediksi hasil sejak awal agar saat memasuki tahap pengembangan sistem informasi dapat berjalan dengan lancar. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan penggunaan diadaptasi dari penelitian DeLone dan McLean yaitu kepuasan menyeluruh, kepuasan informasi, kesenangan, kepuasan komponen pendukung dan kegunaan (DeLone & McLean, 2003).

7. Manfaat Bersih (*net benefits*)

Organisasi yang semakin berkembang maka akan semakin besar ketergantungan pada sistem teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena semakin besar organisasi maka akan semakin banyak data dan transaksi yang terjadi, serta semakin banyak pula keputusan yang harus diambil oleh para pembuat keputusan di dalam organisasi tersebut. Informasi menjadi tidak disajikan secara manual namun harus didapatkan dari suatu sistem informasi yang baik. Pengaruh penerapan sistem teknologi informasi memberikan lima peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi dan kompetensi.

Untuk dapat berguna, maka informasi yang dihasilkan dari suatu sistem teknologi informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timelines*), dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*) (Jogiyanto, 2005). Sistem teknologi informasi yang dapat menjalankan perannya serta memberikan kepuasan bagi penggunaannya (*user satisfaction*) dapat dikatakan sistem informasi tersebut telah mencapai kesuksesan.

Namun penggunaan variabel kepuasan pengguna untuk melihat kesuksesan sistem teknologi informasi mendapat kritik dari Markus dan Keil yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna tidak akan bermakna apabila sistem tersebut tidak menyebabkan peningkatan kinerja individu dan organisasi (Markus & Keil, 1994). Sejalan dengan kritik tersebut, maka DeLone dan McLean memperbaharui model kesuksesan sistem informasi mereka dengan memasukkan *individual impact* dan *organizational performance* sebagai *net benefits* (DeLone & McLean, 2003). Indikator yang digunakan untuk mengukur *net benefits* diadaptasi dari penelitian DeLone dan McLean yaitu penghematan waktu dalam bekerja, meningkatkan kinerja organisasi, efektivitas dalam bekerja, menurunkan tingkat kesalahan atas data, dan memberikan nilai tambah pada organisasi (DeLone & McLean, 2003).

Penelitian ini diadaptasi dari *The Reformulated D&M IS Success Model* (DeLone & McLean, 2003) yang dikombinasikan dengan penelitian Seddon, yaitu *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989). Model penelitian disajikan pada gambar 3.

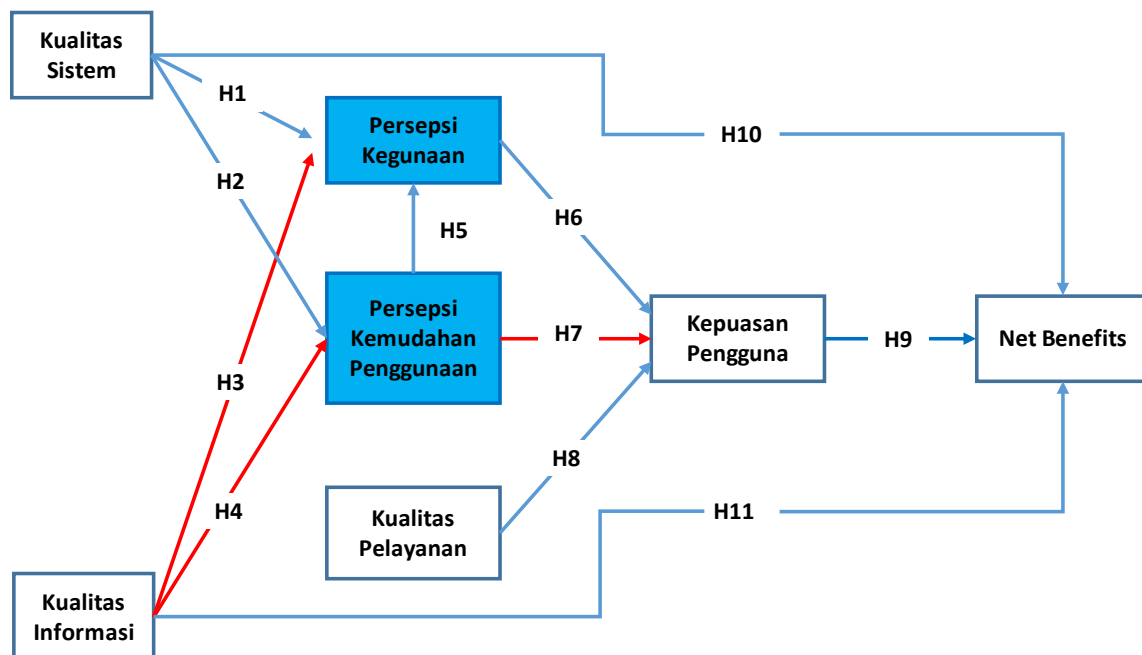
METODE PENELITIAN

Sumber data penelitian terdiri dari data

primer berupa data jawaban yang diperoleh dari kuesioner yang diisi langsung oleh responden yang menjadi anggota sampel. Kuesioner penelitian dibuat dan disebar secara *online* dengan mempergunakan aplikasi *google forms*. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lainnya seperti BPK RI dan BPKP.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif

menggunakan kuesioner metode pertanyaan tertutup, artinya responden akan memilih salah satu jawaban dari lima pilihan dalam skala Likert. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner ini menggunakan pertanyaan yang diadopsi dan dikombinasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriyani (2011), Istiyana (2014) dan Laksono (2014) serta disesuaikan dengan kondisi yang ada.



Gambar 3. Model Penelitian

Keterangan : Construct dari Model TAM;
 Construct dari The Reformulated D&M IS Success Model

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

- H1 : Kualitas sistem berpengaruh terhadap persepsi kegunaan.
- H2: Kualitas sistem berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan.
- H3: Kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan
- H4: Kualitas informasi berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan.
- H5: Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan.
- H6: Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
- H7: Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
- H8: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.
- H9: Kepuasan pengguna berpengaruh terhadap *net benefits*.
- H10: Kualitas sistem berpengaruh terhadap *net benefits*.
- H11: Kualitas sistem berpengaruh terhadap *net benefits*

Dalam kuesioner terdapat lima klasifikasi jawaban yang diberikan dengan pemberian skor sebagai berikut: sangat setuju (SS) skor 5, setuju (S) skor 4, netral (N) skor 3, tidak setuju (TS) skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) skor 1.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna SIMDA BMD terutama pihak pengurus barang di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Grobogan (52 OPD). Sampel penelitian dilakukan secara *simple random sampling* dari target responden sebanyak 104 orang, yaitu dua orang dari setiap OPD. Teknik penyampelan *simple random sampling* efektif dan efisien digunakan pada populasi yang bersifat homogen (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yang merupakan bagian dari *Structural Equation Modelling* (SEM). PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang (*missing values*), dan multikolinearitas (Abdillah & Jogiyanto, 2015). *Software* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *software* SmartPLS versi 2.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total responden yang telah mengisi kuesioner secara lengkap sebanyak 87 responden. Data responden terkait informasi demografi memperlihatkan bahwa 57,5% responden adalah laki-laki dan 42,5% perempuan. Pada tingkat pendidikan, sebesar 34,5% SMA, 18,4% D3, 42,5% S1, 4,6% S2. Untuk usia responden <20 tahun sebesar 1,1%, 20-30 tahun sebesar 23%, 31-40 tahun sebesar 46%, 41-50 tahun sebesar 23% dan >50 tahun sebesar 6,9%. Data responden berikutnya terkait dengan pengalaman menggunakan SIMDA BMD dimana terdapat 19,5% telah menggunakan

SIMDA BMD sebanyak 1-5 kali, 19,5% telah menggunakan SIMDA BMD sebanyak 6-10 kali, dan lebih dari sepuluh kali sebanyak 60,9%.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk variabel laten dengan cara *Confirmatory Factor Analysis* (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

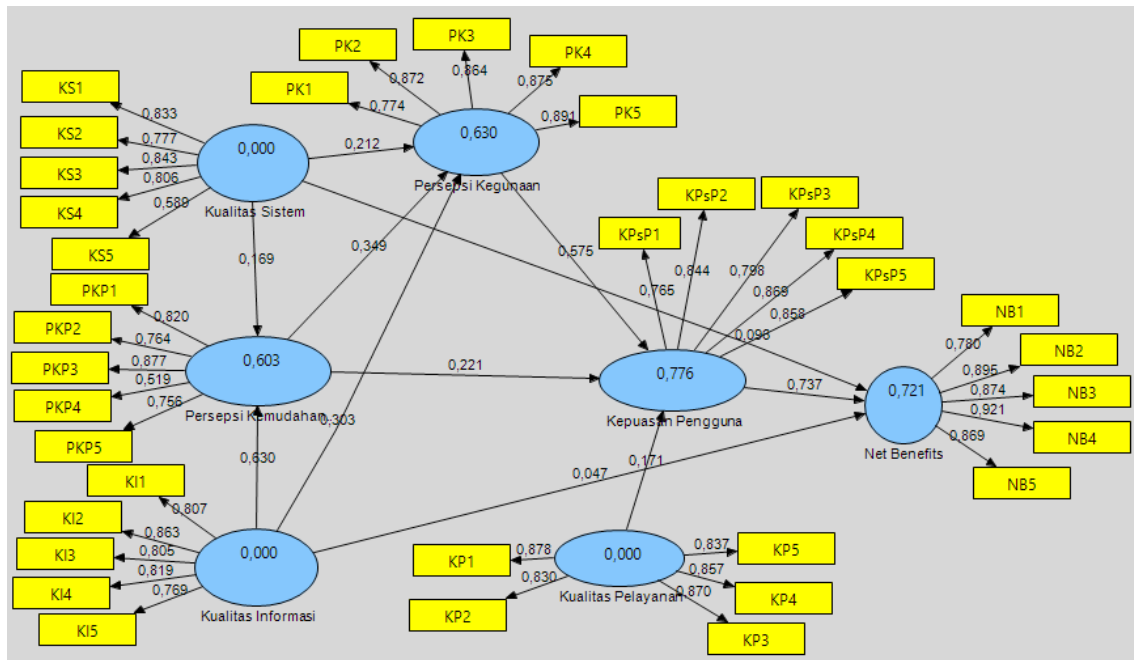
1. Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji validitas konstruk secara umum dapat diukur dengan parameter *outer loading* di model penelitian $>0,7$ serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) $> 0,5$ dan nilai *Communality* $>0,5$. Apabila *outer loading* $<0,5$ maka indikator dapat dihapus dari konstraknya karena indikator ini tidak termasuk dalam konstruk yang mewakilinya. Apabila *outer loading* memiliki nilai 0,5-0,7 maka tidak akan dihapus indikatornya sepanjang AVE dan *Communality* indikator tersebut $> 0,5$ (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

Berdasarkan gambar 4 serta tabel 2 diketahui bahwa hasil iterasi algoritma yang menghasilkan nilai *loading factor* untuk semua indikator memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*) karena tidak ada indikator yang memiliki *outer loading* $<0,5$. Selain itu indikator yang memiliki *outer loading* 0,5-0,7 yaitu KS5 dan PKP4 memiliki nilai AVE dan *Communality* $> 0,5$.

2. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Pengukuran validitas diskriminan dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstraknya atau dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk



Gambar 4. Hasil Outer Loading
 Sumber: Hasil analisa data dengan PLS

Tabel 2. Hasil loading factor, nilai AVE dan Commuality

Konstruk Variabel	Hasil loading factor					AVE	Commuality
	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5		
Kualitas Sistem (KS)	0,833	0,777	0,843	0,806	0,589	0,600743	0,600743
Persepsi Kemudahan Pengguna (PKP)	0,820	0,764	0,877	0,519	0,756	0,573192	0,573191
Kualitas Informasi (KI)	0,807	0,863	0,805	0,819	0,769	0,661009	0,661009
Persepsi Kegunaan (PK)	0,774	0,872	0,864	0,875	0,891	0,732927	0,732927
Kepuasan Pengguna (KPsP)	0,765	0,844	0,798	0,869	0,858	0,685552	0,685552
Kualitas Pelayanan (KP)	0,878	0,830	0,870	0,857	0,837	0,730145	0,730145
Net Benefits (NB)	0,780	0,895	0,874	0,921	0,869	0,755120	0,755120

Sumber: Hasil analisa data dengan PLS

dengan konstruk lainnya dalam model penelitian. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dalam model (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Tabel 3 memperlihatkan nilai akar AVE > korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya sehingga memperlihatkan validitas diskriminan yang baik. Akar AVE dapat dilihat pada bagian diagonal dengan warna.

Reliabilitas (Reliability)

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat

nilai *cronbach's alpha* dan nilai *composite reliability*. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel maka nilai *cronbach's alpha* harus > 0,6 dan nilai *composite reliability* harus > 0,7 (Abdillah & Jogiyanto, 2015). Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan *composite reliability* > 0,7 sehingga semua indikator adalah reliabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk variabel dependen, nilai *path coefficients* (β) atau *t-values* tiap *path* untuk menguji signifikansi

Tabel 3. Nilai Akar AVE terhadap Korelasi Konstruk

Konstruk	KPsP	KI	KP	KS	NB	PK	PKP
KPsP	0,8279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KI	0,8032	0,8130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
KP	0,7035	0,6791	0,8544	0,000	0,000	0,000	0,000
KS	0,7254	0,8012	0,6428	0,7750	0,000	0,000	0,000
NB	0,8149	0,7192	0,6387	0,6702	0,8689	0,000	0,000
PK	0,8017	0,7474	0,6758	0,7045	0,7949	0,8561	0,000
PKP	0,7515	0,7704	0,6519	0,6918	0,6348	0,7289	0,7570

Sumber: Hasil analisa data dengan PLS

Tabel 4. Nilai Composite Reliability, Cronbach's Alpha dan R-square

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Nilai R-square
KPsP	0,915799	0,884664	0,776171
KI	0,906856	0,871643	0
KP	0,931140	0,907539	0
KS	0,881157	0,828245	0
NB	0,938919	0,918006	0,721399
PK	0,931923	0,908117	0,630091
PKP	0,867369	0,808781	0,602641

Sumber: Hasil analisa data dengan PLS

antar konstruk dalam model struktural. Semakin tinggi nilai R-square, maka semakin besar variabel independen tersebut dapat menjelaskan variabel dependen, sehingga semakin baik persamaan struktural (Yamin & Kurniawan, 2011). Pada tabel 4 menunjukkan R-square.

Konstruk *net benefits* sebagai indikator kesuksesan sistem informasi memiliki R-square sebesar 0,721399 yang berarti bahwa variasi pada konstruk *net benefits* dapat dijelaskan oleh konstruk kepuasan pengguna, kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan sebesar 72,13%, sedangkan 27,87% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (*significant level*) 5% dan tingkat keyakinan (*confidence level*) 95%. Nilai t-tabel dengan tingkat

signifikansi 95% untuk hipotesis dua ekor (*two tailed*) adalah $\geq 1,963$ (Yamin & Kurniawan, 2011). Hipotesis akan diterima jika nilai *t-statistics* \geq nilai t-tabel. Tabel 5 memperlihatkan hasil *path coefficients* dan *t-statistics*.

Hasil pengolahan SmartPLS menunjukkan bahwa H1 dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh langsung dan signifikan secara positif terhadap persepsi kegunaan SIMDA BMD dan persepsi kemudahan penggunaan. Hasil hipotesis ini menunjukkan bahwa kehandalan, akurasi data, waktu respon dan *turnover* cepat, kemudahan penggunaan dan konektivitas antar bagian pada SIMDA BMD menjadi pendorong kepercayaan pengguna untuk terus menggunakannya dan pengguna mempercayai bahwa sistem tersebut sangat membantu dan tidak membebani. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2014).

H3 dan H4 diterima dengan signifikansi

Tabel 5. Analisis *T-statistic Path Coefficients Hipotesis*

Hipotesis	Path / Jalur		t-statistics (O/STERR)	Hasil Pengujian $\alpha = 5\%$
	Dari	Ke		
H1	Kualitas Sistem	Persepsi Kegunaan	3,405431	Signifikan
H2	Kualitas Sistem	Persepsi Kemudahan Penggunaan	2,683741	Signifikan
H3	Kualitas Informasi	Persepsi Kegunaan	4,424724	Signifikan
H4	Kualitas Informasi	Persepsi Kemudahan Penggunaan	10,682403	Signifikan
H5	Persepsi Kemudahan Penggunaan	Persepsi Kegunaan	5,668355	Signifikan
H6	Persepsi Kegunaan	Kepuasan Pengguna	13,328507	Signifikan
H7	Persepsi Kemudahan Penggunaan	Kepuasan Pengguna	5,308500	Signifikan
H8	Kualitas Pelayanan	Kepuasan Pengguna	3,395951	Signifikan
H9	Kepuasan Pengguna	Net Benefits	16,727553	Signifikan
H10	Kualitas Sistem	Net Benefits	1,328657	Tidak Signifikan
H11	Kualitas Informasi	Net Benefits	0,734433	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil olah data

dengan *t-statistics* lebih besar dari *t*-tabel sehingga kualitas informasi memengaruhi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi SIMDA BMD yang berhubungan dengan keakuratan, tepat waktu, kegunaan informasi, mudah dipahami dan kelengkapan dapat menjadi pendorong kepercayaan pengguna untuk terus menggunakannya dan bahwa sistem tersebut sangat membantu dan tidak membebani.

Pengujian hipotesis terkait pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi kegunaan (H5) diterima. Hal ini membuktikan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan SIMDA BMD yang berhubungan dengan kemudahan dipelajari, kemudahan akses, kemudahan dipahami, penggunaan yang fleksibel dapat menjadi pendorong kepercayaan pengguna untuk terus menggunakannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Laksono (2014) dan Nussy dan Tanaamah (2015). Sedangkan persepsi kegunaan terhadap kepuasan pengguna (H6) juga diterima. Penggunaan SIMDA BMD yang membantu untuk bekerja lebih cepat, meningkatkan performa pekerjaan serta produktivitas, efektif, membuat pekerjaan lebih mudah serta bermanfaat akan memberikan kepuasan bagi pengguna.

H7 diterima terlihat dalam tabel 5 dengan signifikansi nilai *t-statistics* sebesar 5,3085. Persepsi kemudahan penggunaan memengaruhi kepuasan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan SIMDA BMD yang berhubungan dengan kemudahan dipelajari, kemudahan akses, kemudahan dipahami, penggunaan yang fleksibel, dan kemudahan penggunaan dapat menjadi pendorong kepuasan pengguna.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna SIMDA BMD menunjukkan nilai *t-statistics* sebesar 3,395951 sehingga H8 diterima. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh langsung kualitas pelayanan yang signifikan secara positif terhadap kepuasan pengguna SIMDA BMD. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diimplementasikan apabila didukung pelayanan yang cepat, pengetahuan yang baik, sikap peduli, memberi solusi atas permasalahan, dan dibekali perlengkapan yang memadai maka akan menentukan kepuasan pengguna.

Pengaruh langsung kepuasan pengguna terhadap *net benefits* juga menunjukkan nilai *t-statistics* yang lebih besar dari *t*-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H9 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepuasan pengguna atas SIMDA BMD berpengaruh secara signifikan terhadap penghematan waktu

dalam bekerja, peningkatan kinerja organisasi, efektivitas dalam bekerja, menurunkan tingkat kesalahan atas data, dan memberikan nilai tambah organisasi.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hubungan kualitas sistem terhadap *net benefits* memiliki nilai *t-statistics* dibawah nilai 1,963 sehingga dianggap tidak signifikan. Hasil pengujian tersebut menyatakan bahwa H10 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem yang berhubungan dengan kehandalan, akurasi data, waktu respon dan *turnover* cepat, kemudahan penggunaan dan konektivitas antar bagian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *net benefits*. Hasil analisis deskriptif terkait dengan hipotesis 10 diketahui bahwa konektivitas SIMDA BMD antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan belum dapat dilakukan sinkronisasi secara *online* seluruhnya terutama untuk pengguna SIMDA BMD di sekolah-sekolah yang terkendala jarak yang cukup jauh sehingga untuk konsolidasi data SIMDA BMD masih dilakukan secara *offline* yaitu dengan menggunakan *flash disk*. Selain itu, seringkali saat SIMDA BMD diakses oleh banyak OPD secara bersamaan maka server SIMDA BMD menjadi *down* sehingga waktu respon sistem menjadi lama. Proses konsolidasi data SIMDA BMD yang belum dilakukan secara *online* seluruhnya dan *server* yang sering *down* membuat *net benefits* penggunaan SIMDA BMD Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk aspek penghematan waktu dan efektivitas dalam bekerja belum optimal.

Hasil pengujian H11 mengenai hubungan kualitas informasi terhadap *net benefits* juga menghasilkan nilai *t-statistics* yang lebih kecil dari *t-tabel* sehingga H11 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi yang berhubungan dengan keakuratan, ketepatan waktu, kegunaan informasi, kemudahan dipahami dan kelengkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *net benefits*. Kualitas informasi tersebut tidak

memengaruhi penghematan waktu dalam bekerja, peningkatan kinerja organisasi, efektivitas dalam bekerja, menurunkan tingkat kesalahan data, dan memberikan nilai tambah organisasi. Hasil analisis deskriptif terkait dengan H11 diketahui bahwa peng-*input*-an data aset di SIMDA BMD harus secara detail dan jelas klasifikasi asetnya baik tahun perolehan, nilai aset, spesifikasi aset, nomor inventaris, jenis aset, serta nilai kapitalisasi aset tetap. Data aset-aset yang baru relatif lebih mudah untuk didapatkan namun untuk penginputan data aset-aset yang lama perlu dilakukan inventarisasi secara periodik. Proses penginputan data aset yang tidak lengkap tersebut yang membuat keakuratan dan kelengkapan dalam kualitas informasi SIMDA BMD belum dapat dipenuhi sehingga belum menjadi pendorong *net benefits* dari penggunaan SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Grobogan.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi kesuksesan penggunaan SIMDA BMD dalam penatausahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan menggunakan model kesuksesan sistem informasi gabungan antara model kesuksesan *Updated Delone McLean Information System* dan TAM dapat diketahui bahwa persepsi kegunaan dalam penggunaan SIMDA BMD dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan. Sedangkan kepuasan pengguna dalam menggunakan SIMDA BMD dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kualitas pelayanan. Kepuasan pengguna tersebut akan berpengaruh terhadap *net benefits*. Namun kualitas sistem dan kualitas informasi yang berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan SIMDA BMD tidak berpengaruh secara langsung terhadap *net benefits* penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Grobogan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan SIMDA BMD

dalam penatausahaan aset oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dikategorikan baik karena dinilai dari sebagian besar variabel telah memberikan kepuasan bagi pengguna dan memberikan *net benefits* bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan. Secara umum penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan persepsi kemudahan penggunaan mendorong penggunaan SIMDA BMD.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kualitas sistem terutama terkait dengan waktu respon dan konektivitas antar bagian serta meningkatkan kualitas informasi terutama terkait dengan keakuratan dan kelengkapan data sehingga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap *net benefits*. Langkah-langkah perbaikan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan antara lain melakukan peningkatan konektivitas antar bagian dan peningkatan kemampuan *server* SIMDA BMD untuk meningkatkan kualitas sistem SIMDA BMD serta melakukan inventarisasi secara periodik atas kelengkapan data-data aset untuk meningkatkan kualitas informasi SIMDA BMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam penelitian bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Andriyani, D. (2011). *Analisis kesuksesan implementasi sistem informasi manajemen pemeriksaan di BPK RI dengan model kesuksesan DeLone dan McLean modifikasi* (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- BPK. (2017a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016*. Jakarta: BPK.
- BPK. (2017b). *Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Grobogan TA 2016*. Semarang: BPK.
- BPKP. (2010). *Pedoman Pengoperasian SIMDA Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- BPKP. (2017). *Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Budiriyanto, E. (2013). Kajian legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.id.
- Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 13(3), 319-340.
- DeLone, W., & McLean, E. (1992). Information system success: The quest for the dependent variable. *Information System Research*, 3.
- DeLone, W., & McLean, E. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A Ten year update. *Journal of Management Information Systems*, 19, 9-30.
- Istiyana, A. N. (2014). *Evaluasi kesuksesan Smartone pada PT PLN Persero*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ives, B., Olson, M. H., & Baroudi, J. J. (1983). The Measurement of user information satisfaction. *Communications of The ACM*, 26(10), 785-793.
- Jogiyanto, H. (2005). *Sistem teknologi informasi pendekatan terintegrasi: Konsep dasar, teknologi, aplikasi, pengembangan dan pengelolaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Jogiyanto, H. (2007). *Model kesuksesan sistem informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Laksono, H. (2014). *Evaluasi kesuksesan SIMDA-BMD pada Pemerintah Kabupaten Klaten* (Tesis). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2005). *Sistem informasi manajemen, mengelola perusahaan digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Livari, J. (2005). An empirical test of the DeLone McLean Model of information systems success. *Database for Advance in Information System (DFA)*, 36.
- Markus, M. L., & Keil, M. (1994). If we build it, they will come: Designing information systems that people want to use. *Sloan Management Review*, 11.
- Nussy, L. P., & Tanaamah, A. R. (2015). Evaluasi tingkat penerimaan dan penggunaan aplikasi SIMDA menggunakan Technology Acceptance Model pada Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah. *Seminar Nasional Teknologi Informasi*.
- O'Brien, J. (2004). *Management information system: managing information in the business enterprise 6th Edition*. New York: The McGraw Hill Companies, Inc.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Seddon, P. (1997). A Respectification and extension of the DeLone and McLean Model of IS success. *Information System Research*, 8(3).
- Tim Aplikasi SIMDA. (2017). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. Diakses dari www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp
- Wixom, B., & Watson, H. (2001). An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. *MIS Quarterly*, 27, 17-41.
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Partial least square path modelling*. Jakarta: Salemba Infotek.

